

OJK SELENGGARAKAN THE 4th INDONESIA FINTECH SUMMIT

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan paparan pada pertemuan The 4th Indonesia Fintech Summit yang diprakarasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, AFTECH, dan AFPI di Bali, Kamis (10/11). OJK bersama pemerintah dan pelaku industri finansial teknologi berkomitmen terus mendukung peran industri fintech dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung stabilitas keuangan nasional serta memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat pengguna layanan fintech serta ekosistemnya.



FOTO: ANTARA



BPR SUPRA

PULAUINTAN

General Contractor



PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA

Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

Menko Airlangga Paparkan Kesiapan Indonesia Menjadi Ketua ASEAN 2023

Airlangga Hartarto menjelaskan, saat ini terdapat tiga kekuatan ekonomi utama di kawasan Indo-Pasifik yaitu RRT, India dan ASEAN. Untuk itu, Indonesia harus memastikan bahwa ASEAN berperan sebagai pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan kekuatan besar yang ada.

JAKARTA (IM) - Indonesia siap menerima estafet tanggung jawab sebagai Ketua ASEAN 2023 dari Kamboja, dimana tahun 2023 sendiri merupakan tahun yang penting bagi ASEAN dalam menyongsong Visi Pasca 2025.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memimpin Delegasi RI dalam Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN

(MEA) di Phnom Penh, Kamboja, Kamis (10/11).

"Melanjutkan Presidensi G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN akan menitik beratkan pada penanganan krisis multidimensi seperti krisis pangan, energi, dan keuangan," kata Airlangga dilansir dari laman Kemeko Perekonomian, Kamis (10/11).

Selain menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Kamboja selama tahun 2022 dengan

capaian yang positif khususnya untuk prioritas ekonomi, dalam forum tersebut Airlangga juga menyampaikan bahwa prioritas ekonomi yang diusung Indonesia akan fokus pada 3 (tiga) hal utama yang nantinya akan menjadi rumah dari inisiatif-inisiatif Indonesia pada masa Keketuaan ASEAN di tahun 2023.

Fokus pertama yakni membangun pertumbuhan regional, konektivitas dan keunggulan baru yang dilakukan melalui fasilitasi sektor jasa, ketahanan sektor keuangan, ketahanan pangan sebagai antisipasi krisis serta optimalisasi perdagangan dan investasi.

Fokus berikutnya yakni percepatan transformasi ekonomi digital yang inklusif dan partisipatif untuk mengurangi kesenjangan digital melalui penguatan kerja sama kelancaran konektivitas digital, pembayaran dan keuangan digital, dan memberikan keamanan

pertukaran data digital lintas batas, serta mendukung rantai pasok logistik.

Fokus terakhir yakni mendorong pembangunan infrastruktur hijau, mempercepat implementasi SDGs, dan meningkatkan ketahanan energi dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih tangguh.

Beberapa gagasan prioritas yang akan diusung Indonesia yaitu penguatan ketahanan pangan yang komprehensif mencakup produksi, fasilitasi dan pembiayaan; keterjangkauan dan kemudahan akses terhadap energi dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan; perluasan kerja sama Local Currency Settlement sebagai landasan integrasi keuangan berbasis digital; dan pemanfaatan potensi ekonomi digital kawasan melalui percepatan negosiasi ASEAN Digital Ekonomi Framework

Agreement (DEFA). Selain itu blue economy juga akan diusulkan sebagai prioritas mempertimbangkan potensinya sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi baru.

Airlangga yakin bahwa inisiatif yang disusun Indonesia nantinya akan mendukung ASEAN yang lebih terintegrasi pasca tahun 2025, tangguh terhadap tantangan krisis di masa datang, serta menjadikan ASEAN memiliki peranan penting di kancah global, terutama di kawasan Indo-Pasifik.

"Kawasan ASEAN menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dan kami percaya bahwa pada tahun 2023 akan menjadi tahun penting bagi ASEAN memantapkan pencapaian integrasi ekonomi dan menyongsong Visi Pasca-2025," ujar Airlangga. • **dro**

Citibank Raup Laba Rp1,1 Triliun

JAKARTA (IM) - Citibank Indonesia meraup laba bersih hingga kuartal III 2022 sebesar Rp1,1 triliun. Angka itu naik 31% dari perolehan pada periode yang sama tahun lalu.

"Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh lebih rendahnya biaya cadangan kerugian penurunan nilai kredit, di lini institutional banking," kata CEO Citi Indonesia Batara Sianturi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/11).

Portofolio kredit Citi Indonesia hingga kuartal III 2022 turun sebesar 4,6%, di mana penurunan didominasi oleh kredit di lini bisnis institutional banking.

Sementara itu, total nilai aset Citi Indonesia pada kuartal ini naik 8,3% secara tahunan menjadi Rp95,2 triliun.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh kualitas dana pihak ketiga (DPK) yang berkelanjutan, di mana DPK perseroan tercatat tumbuh sebesar 10,2%. Hal itu membuat perseroan dapat mempertahankan rasio loan to deposit ratio (LDR) yang sehat sebesar

54%.

Perseroan juga memiliki tingkat kecukupan modal yang kokoh dengan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 28%. Adapun, Gross Non-Performing Loan (NPL) perseroan berada pada posisi yang stabil, yaitu sebesar 3,30%.

Perseroan terus memastikan kecukupan pencadangan kerugian penurunan nilai kredit.

Hal ini tercermin dari pencapaian rasio net NPL yang lebih rendah dari 0,94%, menjadi 0,31% di periode yang sama tahun lalu.

"Kami yakin bahwa kualitas portofolio kredit kami tetap dalam kondisi baik dengan penerapan asas kehati-hatian dalam manajemen risiko, untuk mengatasi dampak dari pandemi," ujarnya.

Batara mengatakan, perseroan akan tetap berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, melalui produk dan layanan yang inovatif untuk mendukung perkembangan klien di berbagai sektor. • **pan**

Pengujian di Laboratorium UPTD Dinas PUPR Banten Murah Tapi Akurat Dan Tersertifikasi



AL MUKTABAR Pj. Gubernur Banten

SERANG (IM) - Pemerintah Provinsi Banten melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium atau UPTD Pengujian Bahan Bangunan dan Informasi Konstruksi, yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten memiliki peralatan lengkap terbaru, bersertifikasi dan

memiliki harga pengujian termurah di dalam bahkan di luar Pulau Jawa.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan dalam kunjungan kerjanya di Kantor UPTD Pengujian Bahan Bangunan dan Informasi Konstruksi Provinsi Banten yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 21, Cipocok Jaya, Kota Serang.

Pada kesempatan tersebut, Arlan menjelaskan UPTD Pengujian Bahan Bangunan dan Informasi Konstruksi sudah ada sejak tahun 2002 atau dua tahun sejak berdirinya Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2000.

Kantor UPTD Pengujian Bahan Bangunan dan Informasi Konstruksi Provinsi Banten sendiri memiliki 11



pengujian yang sudah tersertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), di

antaranya adalah Kuat Tarik Baja Beton, Uji Kuat Tekan Beton Dengan Benda Si-

linder, Uji Kuat Tekan Beton Kubus, Uji Keausan Agregat Dengan Mesin Abrasi Los

Angeles, Uji Untuk Analisa Saringan Agregat Halus Dan Kasar, Berat Jenis Nyata Campuran Aspal Dipadatkan Menggunakan Benda Uji Kering Permukaan Jenuh, Metode Pengujian Kadar Aspal Dari Campuran Beraspal Dengan Cara Sentrifus, Uji Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat Kasar, Uji Berat Jenis Dan Penyerapan Air Agregat Halus, Cara Uji Penentuan Kadar Air Untuk Tanah Dan Batuan Di Laboratorium.

Arlan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Banten selalu meningkatkan SDM hingga peralatan di UPTD Pengujian Bahan Bangunan dan Informasi Konstruksi Provinsi Banten, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya UPTD Pengujian Bahan Bangunan dan Informasi Konstruksi Provinsi Banten dapat berjalan dengan baik.

"Jadi selain alatnya lengkap, peralatannya juga sudah sangat terbaru, jadi jangan ragu lagi untuk melakukan pengujian di sini, sudah modernlah (peralatannya)," ujar Arlan Marzan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, pengujian di UPTD Pengujian Bahan Bangunan dan Informasi Konstruksi Provinsi Banten selain dari proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tapi juga

dari Swasta bahkan Universitas di Indonesia.

"Selain proyek-proyek APBD, juga ada proyek swasta, terus dari Universitas juga ada, jadi sudah mulai percaya untuk melakukan pengujian di sini," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Kantor UPTD Pengujian Bahan Bangunan dan Informasi Konstruksi Provinsi Banten, Fransisco De Jesus Barreto mengungkapkan bahwa selain peralatan yang lengkap pihaknya pun selalu meng-upgrade alat-alat yang akan digunakan dalam pengujian. Pasalnya dalam alat-alat terbaru tersebut dapat memberikan hasil yang lebih akurat. Bahkan ketika menggunakan alat yang sudah modern dan serba digital selain menghasilkan uji yang akurat, hasil yang dikeluarkan pun tidak dapat dimanipulasi.

"Jadi ini hasil uji yang sudah langsung terbaca, ada grafiknya ada angkanya, jadi kita ga ragukan lagi. Bukan manual, langsung terbaca di sistemnya, print out langsung keluar jadi angka ga bisa dimain-mainin (Manipulasi). Jadi kalau ada yang bilang kita mainin angka itu tidak bisa, karena ini sudah langsung digital," katanya.

Terkait harga, Fransisco menjelaskan bahwa dirinya mengacu pada peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 yang nilai per parameternya berbeda-beda, jadi selain dari aturan yang berlaku pihaknya tidak melakukan pungutan biaya apapun.

"Setelah kita melakukan survey ke Jawa Barat, ke UI, ternyata kita harganya yang paling di bawah, jadi jangan ragu selain juga bisa memanfaatkan laboratorium dengan harga terjangkau, teman-teman juga bisa memberikan masukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten ketika menggunakan Laboratorium Dinas PUPR," pungkasnya. • **ADV**

